

## Menemukan Kearifan dalam Penerbitan Sebuah Jurnal: Catatan Reflektif dari Dapur Editor

### Esensi Proses: Renungan di Balik Layar Editorial

Sebagai seorang mahasiswa biasa yang gemar meneliti dan menulis, saya menyadari bahwa menjadi bagian dari Jurnal Pro Natura adalah hak istimewa. Saya harus mengakui bahwa sebelumnya, ambisi untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal bereputasi adalah harga diri dan harga mati. Saya secara naif berasumsi bahwa kualitas seorang peneliti dan penulis sangat ditentukan oleh kuantitas publikasi yang dihasilkan. Hasrat untuk memproduksi karya ilmiah sebanyak-banyaknya dengan dalih ‘memperkaya ilmu pengetahuan’ telah menguasai alam bawah sadar saya. Akibatnya, saya seringkali ‘mengutuk’ proses penerbitan jurnal yang memakan waktu lama, tanpa benar-benar menyadari bahwa setiap tahapnya tidaklah mudah. Perasaan ‘cemburu’ saat mendapati rekan yang berhasil menerbitkan karya ilmiah dalam waktu singkat sempat menyulut ambisi peneliti dan penulis dalam diri saya untuk semakin banyak menghasilkan karya ilmiah. Pada titik ini, saya tidak sedang menuduh bahwa karya ilmiah yang diproduksi cepat pasti tidak berkualitas, atau meromantisasi karya ilmiah yang memakan waktu lama sebagai yang lebih berkualitas. Tentu, tidak keduanya—melainkan, saya bermaksud untuk menyampaikan bahwa setiap proses produksi ilmu pengetahuan memiliki cerita dapurnya sendiri yang seringkali tidak kita ketahui.

Beruntungnya saya, sejak Juni 2023 lalu, saya berkesempatan untuk bergabung dalam tim penyusun Jurnal Pro Natura, yang memungkinkan saya mencicipi sendiri rasa dapur sebuah jurnal. Perjumpaan saya dengan Jurnal Pro Natura telah menuntun saya menemukan ‘esensi’ dalam produksi ilmu pengetahuan, yang selama ini luput menjadi bahan renungan bagi saya pribadi. Sebagai seorang Managing Editor pemula, saya secara langsung terlibat dalam setiap tahap produksi naskah di Jurnal Pro Natura. Menyaksikan bagaimana kecermatan dan kesabaran dalam menyeleksi naskah, menentukan *reviewer*, menyunting naskah, hingga menjangkau pembaca, bukanlah perkara mudah. Tentu saja, saya menyadari pula bahwa jalan panjang tersebut adalah ‘prasyarat’ dari komitmen kami untuk menghasilkan naskah yang berkualitas. Siklus produksi ini mengajarkan saya bahwa: *good things take time, great things take even longer*. Konsistensi Jurnal Pro Natura dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai medium pendidikan publik jelas bukan pencapaian individu, melainkan dibentuk oleh kontribusi dari para penulis, *reviewer*, dewan editor, dan tim teknis, yang dilengkapi oleh dukungan penuh dari Departemen Hukum Lingkungan, dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada akhirnya, proses ini mengajak saya untuk merenungkan bahwa alih-alih mengikuti arus untuk berlomba dalam mengejar kuantitas, upaya untuk mengembalikan marwah karya ilmiah yang berkualitas sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dalam proses produksi ilmu pengetahuan masa kini.

### Edisi Kedua

Pada edisi kedua ini, Jurnal Pro Natura tetap konsisten menghadirkan lima artikel yang merefleksikan kemajemukan pendekatan dalam merespon isu hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Zulharman dengan judul *Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam*

*Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat.*<sup>1</sup> Melalui penelitian hukum empiris, artikel ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan praktik asas kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang mempengaruhi aspek kehidupan Masyarakat Adat Dayak Benaq-Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat. Ketiadaan aturan yang jelas telah memicu berbagai konflik ruang antara masyarakat adat, pemerintah, dan swasta, yang secara simultan sukses menambah daftar kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan ruang hidupnya. Zulharman berpendapat bahwa situasi semacam ini seharusnya cukup menjadi dasar bagi pemerintah daerah setempat untuk segera membuat kebijakan terkait penetapan wilayah adat yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat dalam wilayah mereka.

Selanjutnya, artikel kedua yang berjudul *Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik*, ditulis oleh Febrianto yang menilai bahwa, dalam praktiknya, kegiatan usaha pertambangan tersebut bekerja secara ilegal dengan izin lokasi dan UKL-UPL yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Lebih dari itu, proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat Desa Keposong, yang pada akhirnya menciptakan perlawanan sebagai respon atas kekhawatiran akan dampak kerusakan lingkungan pada ruang hidup yang mereka huni. Melalui artikel ini, pembaca diajak untuk membedah buruknya pengaturan dan praktik kegiatan usaha pertambangan di Indonesia masa kini.

Artikel ketiga ditulis oleh Rachmawan, dkk., dengan judul *Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi.*<sup>3</sup> Tulisan ini menyajikan potret interaksi antara masyarakat adat dan transmigran di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi. Pada praktiknya, hubungan antara keduanya dapat ditemukan dan dikaji dalam kerangka fenomena deforestasi yang berkontestasi dengan kebutuhan mereka atas ruang. Akibatnya, pertarungan tersebut tidak hanya berlangsung antara masyarakat adat dan kelompok transmigran melawan birokrat, tetapi masyarakat adat juga saling bertarung melawan kelompok transmigran itu sendiri. Situasi ini, menurut para penulis, semakin diperparah oleh ketiadaan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian atas kontestasi ruang hidup yang berlangsung di wilayah mereka. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan analisis atas kekhawatiran para penulis mengenai peluang munculnya konflik yang lebih tajam di masa depan.

Artikel keempat berjudul *Eksistensi Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang (Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur)*, yang ditulis oleh Darmawardana bersama Athilla.<sup>4</sup> Artikel ini membedah persoalan sistem perencanaan tata ruang yang didesain secara khusus pada Kawasan Candi Borobudur. Melalui rezim penataan ruang berdasarkan Perpres No. 58/2014, akses terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata semakin terbuka lebar di Kawasan Candi Borobudur. Berangkat dari analisis tersebut, para penulis kemudian menyoroti bagaimana sikap negara yang tidak belajar dari carut-marut kegagalan penataan ruang untuk kawasan pariwisata di Bali. Untuk itu, Darmawardana dan Athilla menawarkan jalan keluar berupa dorongan kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan reformasi RTRW dan segera mengesahkan RDTR dengan mengarusutamakan peran masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan untuk pembangunan Kawasan Candi Borobudur. Solusi ini diharapkan mampu menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang tidak lagi memisahkan diri dari kebutuhan masyarakat lokal atas ruang hidup dan kehidupannya.

---

<sup>1</sup> Zulharman, "Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 91-105.

<sup>2</sup> Weli Febrianto, "Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 106-122.

<sup>3</sup> Dicky Rachmawan, "Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 123-140.

<sup>4</sup> Dzaki Aribawa Darmawardana dan Kevin Daffa Athilla, "Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang (Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur)," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 141-155.

Terakhir, artikel berjudul *Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit-Sharing dalam Kebijakan Iklim*, yang ditulis oleh Allyana dan Indriyani, diarahkan untuk mengeksplorasi kerangka kebijakan kemitraan guna mengatasi fenomena kesenjangan distribusi dampak perubahan iklim bagi kelompok rentan, yang dalam hal ini merujuk pada masyarakat adat.<sup>5</sup> Melalui artikel ini, para penulis menyoroti kekosongan hukum mengenai prinsip *benefit-sharing* dalam rezim kebijakan iklim internasional. Namun demikian, tulisan ini menilai bahwa konsep kemitraan ini setidaknya-tidaknya telah ditemukan, meskipun baru secara implisit, dalam kerangka kewajiban transfer teknologi dan pengetahuan kepada negara-negara berkembang untuk menghadapi krisis iklim. Dengan menghadirkan contoh keberhasilan prinsip *benefit-sharing* pada *community forestry* di Nepal dan *social forestry* di ASEAN, tulisan ini berupaya menghadirkan gambaran mengenai kesempatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui konsep *benefit-sharing* dalam kebijakan kontemporer untuk mengatasi krisis iklim.

Dengan ini, kami hadirkan edisi kedua Jurnal Pro Natura kepada para pembaca sekalian. Harapan dan semangat kami tetap sama, agar semoga karya-karya yang dimuat di Jurnal Pro Natura ini senantiasa menjadi media koreksi dan refleksi dalam dinamika arus produksi ilmu pengetahuan hukum dan tata kelola lingkungan masa kini.

**Alfatania Sekar Ismaya**  
Managing Editor Jurnal Pro Natura

---

<sup>5</sup> Olivia Allyana dan Rachma Indriyani, “Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit-Sharing dalam Kebijakan Iklim,” *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 156-167.